



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH  
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG  
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB  
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

# **MUHAJIRI**

# **PERUNDANGAN**

## **TENTANG ANALISIS MENGENAI**

## **DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

# **(AMDAL)**

**Perundangan Lengkap dan Terbaru  
tentang AMDAL  
Berdasarkan Data Resmi dari Kementerian  
Lingkungan Hidup**



PUSTAKA YUSTISIA

# **Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**

Seri Perundang-undangan

ISBN (10) 979-341-117-1

(13) 978-979-341-117-0

14 x 20 cm; 644 hlm.

Penyunting: Tim Redaksi Pustaka Yustisia

Cetakan Pertama, 2012

Diterbitkan Oleh:

**Penerbit Pustaka Yustisia**

Jln. Cempaka Putih CT X No. 8, Deresan,  
Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283

Telp. (0274) 546020, Faks. (0274) 7103084

Website: [www.pustaka-yustisia.com](http://www.pustaka-yustisia.com)

Email: [pustakayustisia@gmail.com](mailto:pustakayustisia@gmail.com)

Distributor Tunggal:

**PT BUKU SERU**

Jl. Kelapa Hijau No. 22 RT 006/03  
Jagakarsa-Jakarta Selatan 12620

Telp. (021) 7888-1850

Faks. (021) 7888-1860

Website: [www.bukuseru.com](http://www.bukuseru.com)

Email: [marketingbukuseru@gmail.com](mailto:marketingbukuseru@gmail.com)

## DAFTAR ISI

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP..... 6
2. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 56 TAHUN 1994 TENTANG PEDOMAN MENGENAI UKURAN DAMPAK PENTING ..... 41
3. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO: KEP-299/11/1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ..... 49
4. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 30 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AKREDITASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN ..... 74
5. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO: KEP-124/12/1997 TENTANG PANDUAN KAJIAN ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN..... 86
6. SURAT EDARAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 1234 TAHUN 1999 TENTANG KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL ..... 111
7. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 4 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TERPADU ..... 114
8. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH LAHAN BASAH..... 168
9. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 08 TAHUN 2000 TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP..... 229
10. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 42 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT..... 242
11. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 86 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ..... 248
12. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 49 TAHUN 2004 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI



	SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) .....	259
13.	KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL).....	261
14.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 08 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP .....	272
15.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.....	325
16.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 12 TAHUN 2007 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....	371
17.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP .....	381
18.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP .....	427
19.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.....	499
20.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP...	535
21.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	563

22.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP .....	585
23.	PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP .....	623

**MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,**

**ttd.**

**PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,**

**ttd.**

**Ilyas Asaad**